



Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan

Peran PPPK Sebagai Regulator Profesi Aktuaris

“Indonesia Actuarial Conference IV”

Jakarta, 17 Oktober 2019

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal – Kementerian Keuangan

PRiME

professional · responsive · innovative · modern · enthusiastic
professional · responsive · innovative · modern · enthusiastic



INFOGRAFIS TUSI PPPK SEBAGAI REGULATOR PROFESI KEUANGAN

PERUMUSAN KEBIJAKAN

PENYAJIAN INFORMASI

Organisasi Internasional

Sertifikasi Profesi

ASOSIASI PROFESI

PERIZINAN

Register

Izin Profesi

Izin Kantor

Wajib dilaporkan kepada PPPK

Laporan Tahunan

DATABASE

PPPK

JASA

Peraturan Per-UU-an

Standar Mutu

Kode Etik dan Standar Profesi

PENGAWASAN

STAKEHOLDER

PENGEMBANGAN PROFESI



Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan

National Affiliations/ Engagements

PPPK berkontribusi dalam peningkatan kualitas kinerja, regulasi, implementasi, dan standar professional Bersama organisasi nasional

Akuntansi



IAI
Ikatan Akuntan Indonesia



I API
Institut Akuntan Publik Indonesia



IAMI
Institut Akuntan Manajemen Indonesia

Penilai



MAPPI
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia

Aktuaris



PAI
Persatuan Aktuaris Indonesia



AKAI
Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia





Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan

Akuntansi



IFIAR

*International Forum of
Independent Audit
Regulators*



AARG

*ASEAN Audit
Regulators Group*



ACPACC

*ASEAN Chartered
Professional Accountant
Coordinating Committee*

International Affiliations/ Engagements

PPPK berkontribusi dalam peningkatan kualitas kinerja, regulasi, implementasi, dan standar professional Bersama organisasi internasional

Penilai



AVA

*The ASEAN Valuers
Association Congress*



PPC

*Pan-Pacific Congress of Real
Estate Appraisers, Valuers,
and Counsellors*



IVSC

*International Valuation
Standards (IVS) Council*

Aktuaris



ASEA

*Actuarial Seminar of
East Asia*



AAC

Asian Actuarial Conference



READI

*Risk
Management,
Economic
Sustainability
and Actuarial
Science
Development
in Indonesia*





Recognitions

PPPK memperoleh beberapa pengakuan kualitas layanan dan kinerja tingkat nasional dan internasional



1. WBK

- *Wilayah Bebas Korupsi*-

Pemenuhan Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian PAN-RB



2. EU

-*European Comission (EU)*-
Pengakuan kesetaraan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK terhadap AP/KAP



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

3. ROSC A&A

- *Reports on the Observance of Standards and Code Accounting and Auditing* -
Pemenuhan 3 dari 4 rekomendasi *World Bank*, menyisakan RUU Pelaporan Keuangan



Financial Action Task Force

4. FATF

- *Financial Action Task Force* -
Pemenuhan kriteria yang diminta oleh FATF yang merupakan syarat pendukung diterimanya Indonesia dalam organisasi FATF



5. FAOA

- *Federal Audit Oversight Authority (FAOA)*. Pemerintah Swiss -
Pengakuan kesetaraan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK terhadap AP/KAP





Tantangan

Beberapa tantangan PPPK dalam menjalankan perannya sebagai regulator profesi keuangan



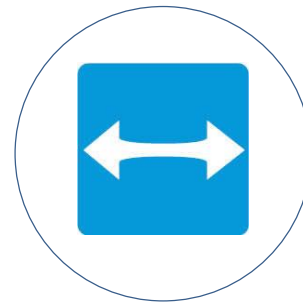
Penyusunan RUU

- RUU Pelaporan Keuangan
 - RUU Penilaian
- Peraturan terkait profesi keuangan



Penguatan Infrastruktur Database

Dukungan IT (digitalisasi) untuk mendukung kelancaran proses bisnis dan sharing data dengan instansi terkait



Perluasan Peran PPPK

Tindak lanjut arahan pimpinan terkait peran strategis PPPK: Kewenangan membina 3 profesi lainnya yaitu Konsultan Pajak, Konsultan Kepabeanaan, dan Pejabat lelang



Struktur Organisasi dan Pengembangan SDM

Pembentukan jabatan fungsional dan peningkatan kompetensi

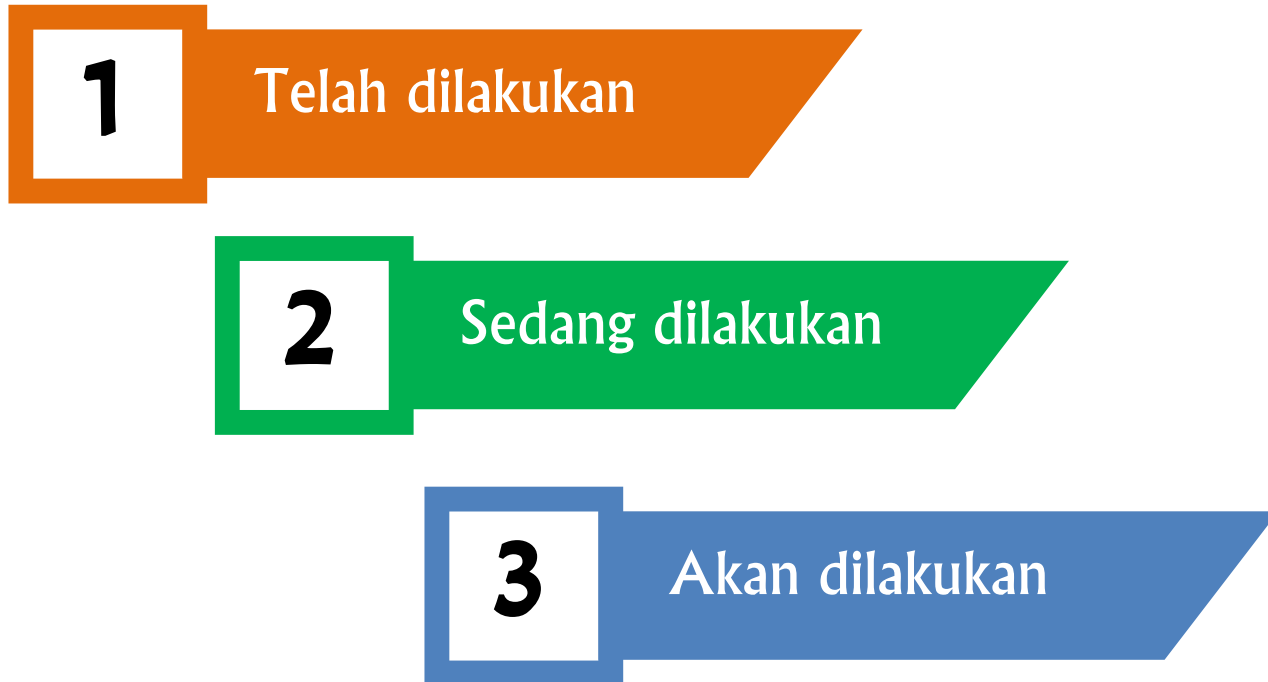


Sinergi Regulator

Sinergi regulator nasional dan internasional (PPPK, OJK, BPK, BI, IFIAR, AARG, dll) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan



Peran PPPK sebagai Regulator Profesi Aktuaris



- Pembinaan
- Pengembangan
- Pengawasan

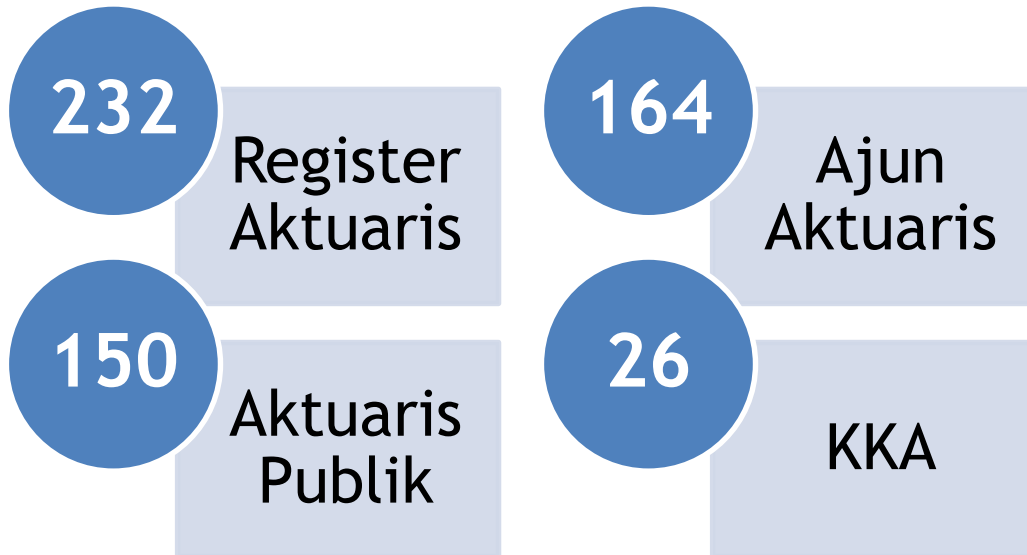


1

Menerbitkan PMK 137/2016 tentang Aktuaris Publik

Mengatur terkait Perizinan, Hak & Kewajiban, dan Sanksi

Jumlah izin yang diterbitkan



*per 30 Sep 2019

Aktivitas Aktuaris Publik





Hak & Kewajiban Aktuaris Publik

Pembuatan Pernyataan Aktuarial
Terkait Produk Asuransi

Penentuan Liabilitas Berupa Cadangan Perusahaan Asuransi,
Dana Pensiun, Jaminan Sosial dan Perusahaan Lainnya yang
Memandatkan Penggunaan Teknik Aktuarial;

Pemberian Pendapat Atas Perhitungan Liabilitas
Yang Memandatkan Penggunaan Teknik Aktuarial

Jasa Lainnya Terkait Aktuarial Sesuai Dengan SPA
Dan Peraturan Perundang-undangan

Menjadi anggota Asosiasi

Mengikuti PPL Setiap Tahunnya Paling Sedikit 20 SKP Dan Diantaranya
Paling Sedikit 5 SKP PPL Yang Diselenggarakan Oleh PPPK

Bertanggung Jawab Atas Jasa Aktuarial Yang Diberikan

Menjaga Independensi Serta Bebas Dari Benturan Kepentingan

Mematuhi Kode Etik Dan SPA, Serta Peraturan Perundang-undangan Yang
Berhubungan Dengan Jasa Aktuarial Yang Diberikan

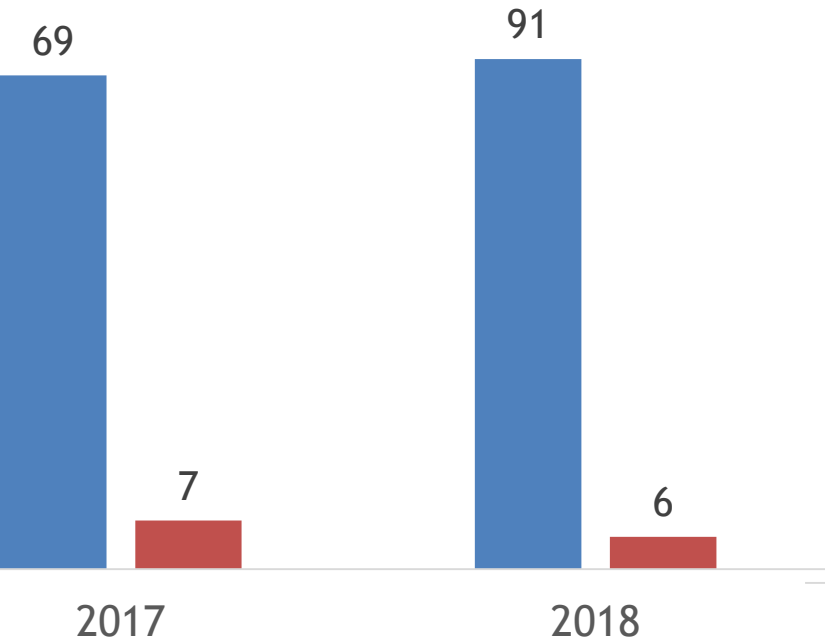
Memelihara Laporan Aktuarial Dan Dokumen Yang Terkait Dengan Jasa
Yang Diberikan Paling Singkat 10 Tahun Setelah Tanggal Laporan Aktuarial



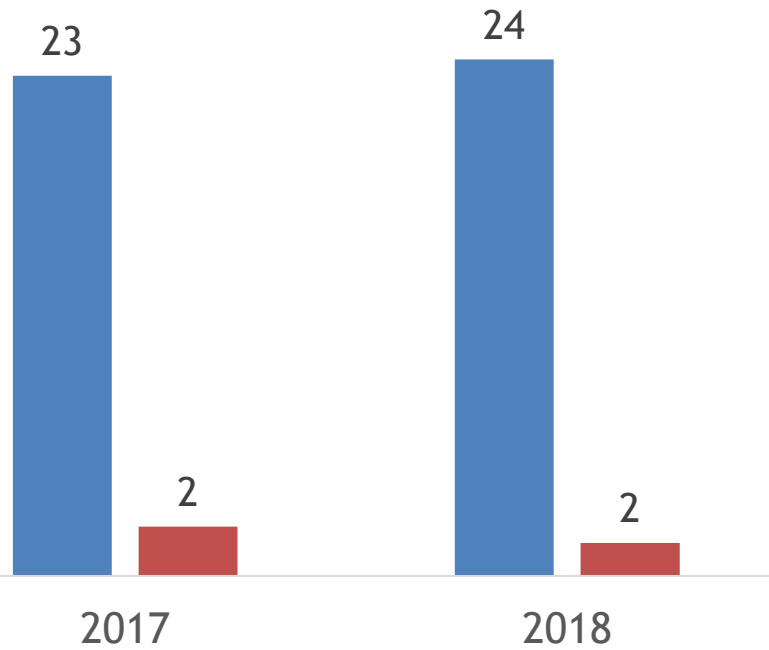


Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha

Aktuaris Publik Non-KKA



Aktuaris Publik KKA



■ Tepat waktu
■ Tidak tepat waktu

Jenis Sanksi

Sanksi administratif berupa

1. Peringatan
2. Pembekuan
3. Pencabutan Rekomendasi





Kegiatan yang telah dilakukan

2

Merekrut Pegawai dengan Latar Belakang Pendidikan Statistika dan Matematika

S1 Statistika	2 Orang
S1 Matematika	2 Orang
S2 Matematika	2 Orang

Membantu AKAI dalam mengembangkan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) untuk Kantor Konsultan Aktuaria

3





Kegiatan yang sedang dilakukan

1

Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Telah dilaksanakan PPL PPPK dalam kegiatan Indonesia Actuaries Summit dan *Indonesian Actuarial Conference* sejak 2017

2

Riset Profesi Aktuaris

- Independensi Profesi Aktuaris pada Perusahaan Asuransi
- Hubungan jumlah Aktuaris dengan Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi

3

Membantu PAI dalam penyusunan Standar Dana Pensiun

4

Ekspo Profesi Keuangan

- Bekerjasama dengan 6 Asosiasi Profesi Keuangan yang dibina PPPK. Dalam rangka mempertemukan Profesi Keuangan dengan *Stakeholders*.
- Kegiatan pameran dan seminar yang dihadiri oleh 2.742 pengunjung





5

Pengawasan terhadap Pofesi Aktuaris

Pemeriksaan Berkala

2018

Dilakukan pemeriksaan berkala pada 35 AKP dan 23 KKA dengan rincian 23 AKP bekerja di KKA dan 2 AKP di perusahaan Asuransi

2019

Sampai dengan 30 September telah dilakukan pemeriksaan pada 6 AKP dari total 15 AKP di Perusahaan Asuransi sesuai RPT 2019

Pemeriksaan Sewaktu-waktu

2018

Dilakukan terhadap 1 AKP

2019

Sampai dengan 30 September telah dilakukan pada 2 AKP

Contoh pertanyaan dalam kegiatan pemeriksaan berkala tahun 2018

Q : Dasar PKA/KKA menyusun kontrak penugasan?

A : Internal (92%); Belum Punya (4%); Lainnya (4%)

Q : Pihak yang menandatangani kontrak penugasan dengan Laporan Aktuaris

A : Sama (65%); Tidak Sama (35%)

Q : Surat Pernyataan kebenaran data yang disampaikan Pemberi Tugas

A : Ada (78%); Tidak Ada (23%)

Q : Sumber Referensi dalam menentukan *Discount Rate*

A : IBPA (74%); PSAK 24 (22%); BI Repo (4%)

Q : PKA/KKA memiliki Format Baku Laporan Aktuaris penugasan Imbalan Kerja

A : Ya (91%); Tidak ((9%)



Revisi PMK 137/2016 tentang Aktuaris mengenai
- Independensi Aktuaris
- Peran/Pekerjaan Aktuaris

Kajian terkait *Appointed Actuary* pada perusahaan
Asuransi

Mendorong PAI untuk membuat dan
menyempurnakan Standar Profesi

MoU dengan Regulator lain



TERIMA KASIH

Jakarta, 17 Oktober 2019

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal – Kementerian Keuangan

PRIME
professional · responsive · innovative · modern · enthusiastic